

GEREJA DAN PASTORAL POLITIK

Suatu Kajian Pastoral atas Peran GMIT dalam Pendampingan bagi Warganya yang Mengikuti Kontestasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Semau dan Semau Selatan

Joice R. Tulle

Gereja Masehi Injili di Timor

Joistulle@gmail.com

Abstract

Pastoral assistance for members who take part in village head election contests is a form of service that has not give serious attention so far. This is evident from the absence of a sustainable and continuous pastoral assistance program before the election, during the election and after the election conducted by the church. Because of this, previous experiences have proven that the election left behind a number of issues which had an impact on the congregational fellowship, including the congregation being fragmented due to differences in the political choices of village head candidates. Therefore, the Evangelical Christian Church in Timor (GMIT) has to start a new chapter by making politics a field of service and preparing in a planned and programmed manner continuous assistance for its members who participate in politics, especially in the village head election contestation in Semau and South Semau Districts. Kupang. The purpose of this writing is to find out the form of GMIT assistance for its citizens who take part in head election contestation in Semau and Semau Selatan Districts. The method used in answering the problem is a qualitative method, through field research and literature research. Field research was conducted through interviews with village head candidates and elected village heads in Semau and South Semau Districts, Pastors in Semau Class, GMIT Congregational Council in Semau Class. A literature review is carried out by searching for sources of scientific literature in relation to the subject discussed with a number of existing political and pastoral theories. The results of this research are expected to become a recommendation for GMIT in all scopes to be able to carry out planned and programmed political pastoral assistance on an ongoing and continuous basis to its citizens participating in the Pilkades contest.

Keywords: church, GMIT, politics, pilkades, pastoral assistance.

ABSTRAK

Pendampingan pastoral bagi warganya yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk pelayanan yang selama ini kurang mendapat perhatian serius. Ini nampak dari belum adanya program pendampingan pastoral yang berkelanjutan dan

berkesinambungan sebelum Pilkades, saat Pilkades dan pasca Pilkades yang dilakukan oleh gereja. Karena itu, pengalaman-pengalaman sebelumnya membuktikan bahwa Pilkades meninggalkan sejumlah persoalan yang mengakibatkan dampak bagi persekutuan jemaat, di antaranya jemaat terkotak-kotak karena perbedaan pilihan politik calon kepala desa. Oleh karena itu, Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) sudah harus memulai babak baru dengan menjadikan politik sebagai medan pelayanan dan mempersiapkan secara terencana dan terprogram pendampingan berkelanjutan bagi warganya yang ikut berpolitik, khususnya dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Kecamatan Semau dan Semau Selatan Kabupaten Kupang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pendampingan GMIT bagi warganya yang mengikuti kontestasi Pilkades di Kecamatan Semau dan Semau Selatan. Metode yang digunakan dalam menjawab masalah adalah metode kualitatif, melalui penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan calon kepala desa dan kepala desa terpilih di Kecamatan Semau dan Semau Selatan, Para Pendeta se-Klasis Semau, Majelis Jemaat GMIT di Klasis Semau. Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mencari sumber literatur ilmiah sehubungan dengan pokok yang dibahas dengan sejumlah teori politik dan pastoral yang ada. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu rekomendasi untuk GMIT pada semua lingkup dapat secara terencana dan terprogram melakukan pendampingan pastoral politik secara berkelanjutan dan berkesinambungan kepada warganya yang ikut dalam kontestasi Pilkades.

Kata Kunci: gereja, GMIT, politik, pilkades, pendampingan pastoral.

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, poin 5, mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹ Maka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya membangun desa secara demokratis, karena dengannya masyarakat memilih dan mempercayakan mereka yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Karena itu, peran masyarakat yang juga adalah warga gereja mesti nampak untuk membangun demokrasi yang sehat.

Pilkades adalah kesempatan bagi rakyat untuk dapat menyalurkan hak politiknya secara langsung. Pada tahun 2022, di Kecamatan Semau dan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara serentak dilaksanakan Pilkades, yaitu tiga desa di Kecamatan Semau di antaranya Desa Uiasa, Desa Huilelot, Desa Otan; dan satu desa di Kecamatan Semau Selatan, yaitu Desa Uitiuh Ana. Pelaksanaan pemilihannya berlangsung pada tanggal 7 November 2022. Pertanyaan penting: Bagaimana sikap gereja dan warga gereja sebelum dan setelah Pilkades? Apa peran gereja dan warganya menyikapi momentum politik dalam Pilkades? Pertanyaan ini penting karena Pilkades berdampak pada perpecahan di desa dan jemaat. Karena itu, gereja perlu mempersiapkan warga jemaat (calon kepala desa) yang ikut kontestasi secara baik. Gereja semestinya kritis dan proaktif dalam menyikapi setiap fenomena

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, poin 5

yang terjadi dalam masyarakat terutama dalam hal politik, sebab itu merupakan panggilan dan hakikat gereja yang diutus kedalam dunia untuk berada dalam dunia dan menjadi berkat bagi dunia (band. Yeremia 29:7).

Berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang terjadi, Pilkades meninggalkan sejumlah persoalan yang mengakibatkan dampak bagi persekutuan jemaat, di antaranya jemaat menjadi terkotak-kotak karena perbedaan pilihan politik calon kepala desa, persoalan dalam masyarakat dibawa dalam persekutuan berjemaat, timbul rasa dendam yang mengakibatkan relasi antara sesama menjadi tidak harmonis, bahkan ada di antara kepala desa yang lebih berorientasi pelayanannya hanya kepada tim sukses atau masyarakat yang mendukungnya saja, timbul kecurigaan-kecurigaan dalam masyarakat terhadap pelayanan kepala desa, serta bahaya koruptif terhadap pengelolaan dana desa yang cukup besar.

Melihat fenomena yang ada, maka gereja berada pada posisi mempersiapkan warganya untuk mempergunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, agar dapat memberi sumbangan dan partisipasi positif bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Gereja mendorong dan mendampingi warganya untuk tampil dalam politik praktis secara santun dan elegan berdasarkan nilai-nilai kristiani. Karena itu, Gereja secara kelembagaan memang harus melihat fenomena ini, sekaligus mendampingi warganya dengan memberikan pendampingan pastoral politik bagi warganya.

Sehubungan dengan itu A. A. Yewangoe mengatakan bahwa “gereja harus terus melakukan pendampingan pastoral kepada setiap warganya yang terlibat dalam politik praktis. Warga gereja tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Gereja tidak boleh hanya mencela warganya yang terlibat politik, dengan pemahaman bahwa politik itu tabu dan dianggap kotor, tetapi gereja mesti memahami secara persis apa yang diperjuangkan warganya itu yang terlibat dalam politik. Karena itu, gereja benar-benar secara bertanggung jawab melibatkan diri dalam persoalan-persoalan bersama”.²

Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), dalam hal ini melalui Majelis Klasis Semau dan Majelis Jemaat, memainkan peran pastoral untuk turut menentukan kualitas, integritas, dan moralitas para calon kepala desa dan kepala desa terpilih di Kecamatan Semau dan Semau selatan. Gereja tidak boleh tinggal diam lalu membiarkan warganya yang terlibat dalam kontestasi Pilkades untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Gereja perlu tampil sebagai konselor yang baik bagi warganya yang berpolitik praktis. Peran pastoral gereja mesti berkesinambungan dan berkelanjutan bukan saja sebelum pelaksanaan Pilkades tetapi juga pasca Pilkades.

Pokok-pokok Eklesiologi mengarahkan GMIT kepada politik populis, perjuangan hak asasi manusia dan keutuhan ciptaan.³ Untuk itu, yang dilakukan oleh GMIT terhadap anggotanya di bidang politik, antara lain:

1. Pendampingan pastoral bagi para pelaku politik demi mempengaruhi etika/moral;
2. Melakukan fungsi edukasi atau pendidikan politik bagi anggotanya.⁴

Karena itu, peran pendampingan pastoral yang dilakukan gereja dapat dipahami sebagai kemampuan gereja mendampingi, membimbing, ikut memperkuat dan mendoakan warganya

²A. A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 224 -225.

³ Rekomendasi Persidangan Sinode GMIT XXXIV/2019 Kepada Majelis Sinode GMIT Periode 2020-2023 untuk menetapkan Perubahan atas Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 28/KEP/SIN-GMIT/XXXI/ 2007 Tentang Presensia dan Representasi Kristen Dalam Politik

⁴ Ibid., 2.

yang ikut dalam kontestasi Pilkades dan yang ada dalam kekuasaan agar dapat bekerja sesuai dengan nilai-nilai Kerajaan Allah. Artinya tidak menyimpang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial.⁵

Untuk mendapatkan data dalam penelitian dengan tujuan dan kepentingan peneliti maka dibutuhkan metode penelitian. Data yang diperoleh haruslah data yang valid, dapat dipercaya dan objektif.⁶ Inilah yang disampaikan Sugiyono untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.

Metode yang dipakai untuk penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka (*Library Research*).

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data melalui berbagai sumber literatur seperti buku-buku, arsip atau dokumen gereja, majalah, jurnal, artikel dan berbagai karya dan pendapat-pendapat ilmiah terkait topik yang dibahas. Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mencari sumber literatur ilmiah sehubungan dengan pokok yang dibahas dengan sejumlah teori politik yang ada maupun pastoral yang ada.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) melalui observasi dan wawancara.

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan calon kepala desa dan kepala desa terpilih di empat desa yang melakukan pemilihan kepala desa pada tahun 2022 di Kecamatan Semau dan Semau Selatan, Majelis Klasis Semau, dan Majelis Jemaat tempat pelaksanaan Pilkades. Para responden juga telah menyetujui untuk penulis menggunakan nama mereka dalam tulisan ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, guna mengetahui korelasi politik dalam pemilihan kepala desa dengan pelayanan gereja serta peran gereja terhadap warganya yang ikut dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Jemaat/calon Kepala Desa:

a. Pandangan jemaat/calon kepala desa tentang politik.

Dalam memahami politik khususnya dalam konteks desa, ada beberapa calon kepala desa yang mengatakan bahwa politik adalah bidang pelayanan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yigal Laiskodat bahwa politik bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Dalam konteks desa politik melalui Pilkades adalah sarana demokrasi untuk memilih pemimpin dalam menata jalannya pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.⁷

Bagi penulis, ini adalah tujuan yang sangat mulia oleh karena kesejahteraan masyarakat umum menjadi prioritas ketika nanti terpilih. Karena memang, semua yang dikerjakan jika terpilih nanti pastinya untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga penataan pemerintahan kedepan juga menjadi prioritas sehingga jalannya pemerintahan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 285.

⁶ Ibid, 3.

⁷ Yigal Laiskodat, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Dany Killa dan Uniasis Lafu bahwa politik adalah proses mendapatkan kekuasaan dalam memerintah untuk kepentingan umum.⁸ Bagi penulis, pandangan ini sejalan dengan motivasi untuk mendapatkan kekuasaan. Karena dengan kekuasaan yang di dapat, bisa dipakai untuk melakukan kebijakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Juga dalam memahami politik, Daud Nenokeba, Yan Lao, Yusuf Mestuni, dan Imanuel Holeng mengatakan bahwa politik adalah pelayanan. Orang yang berpolitik dalam hal ini mengikuti Pilkades adalah orang yang merasa bahwa politik adalah panggilan pelayanan.⁹ Pandangan ini sesungguhnya bagi penulis merupakan melihat politik sebagai medan layan, serta kehadirannya sebagai pelayan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya karna bertanggungjawab pada pemberi pelayanan.

b. Faktor-faktor yang membuat mereka terlibat dalam politik di tingkat desa melalui Pilkades. Sangat ideal motivasi warga GMT yang adalah para calon kepala desa untuk ikut dalam kontestasi Pilkades, yaitu secara umum faktor yang membuat mereka terlibat dalam kontestasi Pilkades adalah merasa terpanggil untuk mensejahterahkan masyarakat dan pembenahan segala aspek yang ada di dalam desa,¹⁰ membangun desa yang lebih baik,¹¹ memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,¹² membawa perubahan dalam pelayanan dan pembangunan ke arah yang lebih baik.¹³ Ada juga yang termotivasi untuk menjadi kepala desa oleh karena ingin memuliakan Tuhan melalui politik serta memajukan dan membangun desa sehingga mampu bersaing dengan desa lain.¹⁴

Semangat dan motivasi yang tulus sebagai faktor keterlibatan mereka dalam Pilkades juga disampaikan oleh beberapa calon kepala desa yang mengatakan bahwa:

“Motivasi dan tujuan saya ikut dalam kontestasi Pilkades adalah mau melayani masyarakat. Menjadi kepala desa adalah panggilan Tuhan dalam pengabdian kepada masyarakat. Ini menjadi faktor utama saya terlibat di dalam Pilkades”.¹⁵

c. Harapan mereka ketika terpilih sebagai kepala desa

Harapan para calon kepala desa dalam Pilkades jika mereka terpilih menjadi kepala desa adalah terkait dengan tanggungjawab menciptakan suasana aman dan damai. Ini berangkat dari banyak pengalaman sebelumnya bahwa Pilkades meninggalkan sejumlah soal yang berdampak pada persekutuan jemaat menjadi terkotak-kotak, adanya rasa dendam serta relasi yang kurang harmonis karena berbeda pilihan politik, yang tidak terpilih menjauhkan diri dari persekutuan, dan yang terpilih lebih berorientasi pelayanannya pada tim sukses dan mereka yang memilihnya, serta bahaya koruptif terhadap dana desa yang cukup besar. Karena itu jika ia terpilih maka ia akan melaksanakan tanggungjawabnya untuk dapat menciptakan suasana menjadi aman dan damai.¹⁶ Ada juga yang mengatakan harapanya jika terpilih menjadi kepala desa yaitu:

⁸ Dany Killa, Uniasis Lafu, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

⁹ Daud Nenokeba, Yan Lao, Yusuf Mestuni, Imanuel Holeng, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

¹⁰ Yigal Laiskodat, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

¹¹ Yapi Holbala, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

¹² Imanuel Holeng, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

¹³ Dany Killa, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

¹⁴ Efron Suna, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

¹⁵ Daud Nenokeba dan Uniasis Lafu, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

¹⁶ Yusuf Mestuni, Jhon Batukh, Yan Lao, wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

“Jika saya terpilih menjadi kepala desa dan mendapatkan kuasa untuk menjalankan pemerintahan maka saya mau berusaha untuk meminimalisir dampak dari Pilkades yang mengakibatkan persekutuan menjadi terkotak-kotak.”¹⁷

Dalam pergumulan seperti ini, ada juga yang begitu optimis bahwa jika Tuhan berkenan saya terpilih menjadi kepala desa maka hikmat dan kreativitas, Tuhanlah yang memungkinkan saya untuk melayani masyarakat secara baik.¹⁸

Dari sekian calon kepala desa yang ikut di dalam kontestasi Pilkades, ada beberapa calon yang mengatakan bahwa:

“Jika saya menjadi kepala desa terpilih maka harapan ke depan yang akan saya lakukan adalah merangkul dan mempersatukan mereka yang mendukungnya dan mereka yang tidak mendukungnya atau memulihkan kembali relasi kelompok yang berbeda pilihan politik serta memperlakukan dua kelompok ini dengan sikap yang setara”.¹⁹

Ada juga yang mengatakan bahwa:

“Harapan jika saya menjadi kepala desa terpilih maka hal yang saya lakukan adalah membangun kemitraan yang baik, menjadi figur yang dapat membawa perubahan, menjadi pemimpin bagi semua masyarakat bukan saja bagi keluarga atau kelompok tertentu, mendengar dan tahu pergumulan semua masyarakat bukan keluarga atau tim sukses saja”.²⁰

d. Cara mereka melihat diri mereka yang adalah orang Kristen dalam kancah politik.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan sejumlah padangan yang hampir sama dari semua jemaat yang ikut dalam Pilkades terkait dengan cara mereka melihat diri mereka sebagai orang Kristen dalam kancah politik. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat diri mereka dalam kancah politik sebagai garam dan terang yang dapat bermanfaat bagi banyak orang.²¹ Ada pula yang mengatakan bahwa kehadiran mereka di kancah politik dapat menjadi panutan dan teladan sebagaimana Yesus Kristus menjadi panutan dan teladan bagi mereka dalam menjalani tanggung jawab yang diberikan.²² Ada pula yang mengatakan bahwa mereka melihat diri mereka sebagai orang kristen dalam kancah politik sebagai pembawa damai sejahtera, keadilan, dan kebenaran bagi masyarakat.²³

Pandangan Majelis Jemaat

a. Pandangan Majelis Jemaat tentang politik.

Dalam memaknai dan memahami politik khususnya dalam konteks Pilkades, empat orang pendeta mewakili Majelis Jemaat yang berada di wilayah pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu Donny Banik, mengatakan bahwa:

“Politik adalah cara semua lembaga mencapai tujuan termasuk gereja di dalamnya, karena itu politik merupakan salah satu bagian dari pelayanan gereja. Jika warga/jemaat terlibat di dalam politik justru akan sangat membantu gereja dalam mengerjakan pelayanan bersama”.²⁴

Yalven Tamen, mengatakan bahwa:

“Politik adalah bagian dari pelayanan gereja bagi warganya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan jemaat secara umum berdasarkan nilai-nilai kristiani. Karena itu, Majelis

¹⁷ Dany Killa, Efron Suna, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

¹⁸ Daud Nenoakeba, Hernimus Poto, Thomas Katu Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

¹⁹ Yapi Holbala, Yigal Laiskodat, Imanuel Holeng Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

²⁰ Uniasis Lafu, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

²¹ Yan Lao, Dani Killa, Imanuel Holeng, Yigal Laiskodat, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

²² Uniasis Lafu, Yapi Holbala, Hernimus Poto, Thomas Katu, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

²³ Jhon Batukh, Yusuf Mestuni, Daud Nenoakeba, Efron Suna, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

²⁴ Dony Banik, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

Jemaat sangat menyetujui jemaat/warganya ikut ambil bagian dalam kontestasi Pilkades sesuai dengan nilai-nilai kristiani”.²⁵

Sedangkan Lidya Muni dan Welmince Tude mengatakan bahwa:

“Politik adalah medan pelayanan gereja untuk menata kehidupan bersama menjadi lebih baik dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat umum demi kesejahteraan manusia dan alam ciptaan Tuhan, karena itu kehadiran warga/jemaat dalam politik khususnya dalam Pilkades akan sangat menolong gereja di dalam penataan kehidupan bersama”.²⁶

Pada prinsipnya, Majelis Jemaat sangat menyetujui warga/jemaat ikut dalam kontestasi politik, khususnya dalam konteks Pilkades, karena keterlibatannya akan sangat menolong gereja untuk dapat bersama-sama melakukan pelayanan demi penataan kehidupan bersama.

b. Faktor-faktor yang membuat jemaatnya terlibat dalam politik di tingkat desa melalui Pilkades Ada beberapa faktor yang dilihat oleh Majelis jemaat terkait dengan jemaatnya/warganya yang terlibat dalam Pilkades, sebagaimana yang disampaikan oleh Yalven Tameno bahwa:

“Adanya keprihatinan warga jemaat terhadap kenyataan segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa sekarang yang tidak berpihak pada kepentingan umum, tetapi hanya berpihak pada segelintir orang saja”.²⁷

Juga disampaikan oleh Lidya Muni bahwa:

“Faktor yang membuat warga jemaat terlibat di dalam kontestasi Pilkades yaitu kesadaran akan panggilan pelayanan sebagai kepala desa adalah panggilan Tuhan untuk melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat dan berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat umum melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat”.²⁸

Tetapi sedikit beda dengan yang disampaikan oleh Dony Banik dan Welmince Tude bahwa:

“Faktor yang membuat jemaatnya terlibat dalam kontestasi Pilkades adalah masih produktifnya mereka untuk bekerja melayani masyarakat dengan pengelolaan dana desa yang cukup besar untuk kepentingan masyarakat umum”.²⁹

c. Harapan Majelis Jemaat terhadap jemaatnya ketika terpilih sebagai kepala desa.

Menurut Ketua Majelis Jemaat Elim Oetefu Kecil, harapan Majelis Jemaat terhadap jemaat/warganya yang ikut dalam kontestasi Pilkades dan jika terpilih menjadi kepala desa adalah soal tanggungjawab gereja untuk mendoakan bahkan memberi pendidikan politik yang benar melalui diskusi-diskusi tak terprogram bagi warganya yang ikut berpolitik agar ketika mereka menjalani tahapan ini sampai pada terpilih menjadi kepala desa maka mereka harus menjalaninya sesuai dengan etika berpolitik dan nilai-nilai kristiani, sehingga ketika mereka terpilih, mereka dapat mejalani tugas tanggung jawab sebagai kepala desa dengan takut akan Tuhan.³⁰ Juga seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat Getsemani Otan bahwa harapan Majelis Jemaat bagi mereka yang terpilih sebagai kepala desa untuk dapat menjalaninya dengan penuh tanggung jawab dan mampu menjadi garam dan terang bagi masyarakat.³¹ Begitu juga yang disampaikan Ketua Majelis Jemaat Sonaf Mole Uiasa bahwa harapan Majelis Jemaat

²⁵ Yalven Tameno, Wawancara pada tanggal 26 januari 2023

²⁶ Lidya Muni, Welmince Tude, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

²⁷ Yalven Tameno, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

²⁸ Lidy Muni, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

²⁹ Dony Banik, Welmince Tude, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

³⁰ Wemince Tude, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

³¹ Lidya Muni, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

bagi jemaat/warganya yang terpilih sebagai kepala desa agar menjalani tugas tanggung jawabnya dengan mengedepankan nilai-nilai kristiani.³²

Adapun pendapat yang disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat Sonaf Neka Huilelot bahwa:

“Mereka berharap agar para calon dan kepala desa terpilih dapat membangun kemitraan yang baik, menjadi figur yang dapat membawa perubahan, menjadi pemimpin bagi semua masyarakat bukan saja bagi keluarga atau kelompok tertentu, mendengar dan tahu pergumulan semua masyarakat bukan keluarga atau tim sukses saja”.³³

d. Cara Majelis Jemaat melihat diri jemaat yang adalah orang Kristen dalam kancah politik Dalam konteks ini, semua Majelis Jemaat melihat diri jemaat/warganya yang adalah orang Kristen dalam kancah politik sebagai orang-orang yang menjadi panutan, yang berfungsi sebagai garam dan terang bagi sesamanya, menjalaninya dengan takut akan Tuhan, dan mencerminkan nilai-nilai kristiani.³⁴ Karena itu, penulis menyimpulkan yang sama dengan pandangan responden.

Bentuk pendampingan GMIT bagi warganya yang ikut dalam kontestasi Pilkades di Kecamatan Semau dan Semau Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, dengan pertanyaan apa saja bentuk pendampingan GMIT bagi warganya yang ikut dalam kontestasi Pilkades? Semua jemaat calon kepala desa yang ikut dalam kontestasi Pilkades mengatakan bahwa:

“Bentuk pendampingan GMIT hari ini hanya doa yang dilakukan oleh pendeta bagi kami para calon kepala desa di jemaat masing-masing. Sedangkan di Klasis sudah mulai dengan Pastoral Politik dan ibadah/doa pengutusan”.³⁵

Ada pula para Ketua Majelis Jemaat tempat pelaksanaan Pilkades mengatakan bahwa:

“Bentuk pendampingan yang telah GMIT lakukan untuk membantu pergumulan para calon kepala desa adalah mendoakan mereka, berdiskusi dengan mereka secara pribadi”.³⁶

Beberapa anggota Majelis Klasis mengatakan bahwa:

“Bentuk pendampingan yang dilakukan gereja melalui Majelis Klasis Semau adalah melakukan doa bersama, percakapan Pastoral Politik kepada mereka yang adalah para calon kepala desa untuk menjalani proses dengan baik, jujur, sportif, tidak memakai politik uang, tidak kampanye hitam, dan nantinya dapat menerima apapun hasil yang didapat. Jika terpilih tetap berorientasi pada pelayanan bagi seluruh masyarakat desa dengan mensejahterakan masyarakat desa, bekerja dengan penuh dedikasi yang tinggi, menjadi pemimpin yang adil dan jujur serta mengedepankan nilai-nilai kristiani. Para calon kepala desa juga mendapatkan pendidikan politik untuk mencegah akibat Pilkades yang berdampak pada relasi yang tidak harmonis dan perpecahan dalam persekutuan masyarakat dan jemaat”.³⁷

Bagi penulis, apa yang disampaikan oleh para responden ini mewakili semua calon yang merasakan bentuk pelayanan gereja yang sepanjang ini dilakukan. Penulis berpendapat bahwa

³² Donny Banik, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

³³ Yalven Tameno, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

³⁴ Dony Banik, Yalven Tameno, Lidya Muni, Welmince Tude, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

³⁵ Semua calon kepala desa memberi jawaban yang sama dalam wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

³⁶ Donny Banik, Yalven Tameno, Lidya Muni, Welmince Tude, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

³⁷ Paulus Wahy, Martha Lomi, Obed Liha, Steven Bessie, Ebert nabu Bois, Dorce Eluama, Aristoteles Sandy, Adolfina Aome, Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

memang selama ini, perhatian gereja terhadap dinamika politik lokal kurang mendapat perhatian serius. Gereja belum secara baik mempersiapkan warganya untuk mengikuti kontestasi politik lokal. Itu dibuktikan dengan belum terencana dan belum terprogram pelayanan pendampingan pastoral kepada warganya yang mengikuti kontestasi Pilkades. Pelayanan yang dilakukan gereja hanya melakukan doa dan diskusi tidak terprogram yang bisa saja tidak dihadiri oleh warga yang ikut dalam kontestasi Pilkades. Ini bisa juga berdampak pada kurang memahaminya pilihan yang diambil para calon kepala desa dalam kontestasi Pilkades dalam berpolitik di konteks lokal ini.

Harapan jemaat yang mengikuti kontestasi Pilkades pada GMT

Bagian ini penting untuk mengetahui sejauh mana hubungan calon kepala desa mau pun kepala desa terpilih dengan gereja dalam memahami politik di wilayah desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa responden yang adalah calon kepala desa bahwa hubungan gereja dan politik dalam desa mestinya saling mendukung dan memberikan kontribusi baik, sebab keduanya akan mengerjakan pelayanan bagi kesejahteraan jemaat dan masyarakat.³⁸ Harapan jemaat yang mengikuti kontestasi Pilkades pada GMT adalah ke depan GMT mesti berperan untuk memberikan Pendampingan pastoral politik dan edukasi politik yang baik dan benar bagi jemaatnya.³⁹

Pemahaman ini akan berdampak pada hubungan para calon kepala desa dengan gereja sebelum dan setelah terpilih. Berdasarkan wawancara dengan para calon kepala desa, mereka memahami hubungan ini harus terus baik, baik sebelum dan setelah terpilih sebagai relasi yang terus ada dan berkesinambungan. Artinya bahwa gereja mesti terus mendampingi warganya sebelum dan setelah terpilih guna berkualitas kepemimpinan ke depan dan selalu mengedepankan nilai-nilai kristiani dalam melaksanakan kuasa pemerintahan yang didapatnya.⁴⁰ Senada dengan itu, juga penting untuk gereja terus mendoakan warganya yang ikut dalam kontestasi Pilkades serta berkarya melalui pastoral politik, dan pendampingan berkelanjutan bukan hanya pada saat Pilkades tetapi juga setelah Pilkades.⁴¹

Bagi penulis, kehadiran gereja melalui pendampingan pastoral belum mendapat perhatian serius. Itu dibuktikan dengan belum secara terencana program itu dilakukan. Gereja terkesan acuh dengan tanggungjawabnya untuk memberi perhatian serius bagi warganya yang ikut ambil bagian dalam politik lokal ini. Karena itu, gereja sudah harus melihat kenyataan dan dampak Pilkades sebelumnya untuk memberikan perhatian serius melalui program-program terencana seperti pendekatan pastoral politik bagi warganya secara berkesinambungan dan berkelanjutan terhadap warganya yang mengikuti kontestasi Pilkades.

ANALISIS

1. Politik sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat dan jemaat untuk kesejahteraan bersama

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa salah satu jawaban yang mengemuka adalah politik dipahami sebagai penataan kehidupan bersama yang berdampak bagi kesejahteraan gereja dan masyarakat. Pandangan ini sesuai dengan pemahaman Mery Kolimon

³⁸ Uniasis Lafu, Yusuf Mestuni, Imanuel Holeng, Dany Killa, Yapi Holbala, Yigal Laiskodat Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

³⁹ Efron Suna, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

⁴⁰ Yigal Laiskodat, Imanuel Holeng, Yapi Holbala, Uniasis Lafu, Yusuf Mestuni, Efron Suna, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

⁴¹ Yusuf Mestuni, Imanuel Holeng, Dany Killa, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

bahwa gereja punya tanggung jawab politik. Sebagai orang Kristen kita beriman pada Allah yang berpolitik. Penciptaan dunia adalah sebuah tindakan politis Allah: mengatur dari kekacauan menjadi keteraturan demi sejahtera semua makhluk. Politik Allah adalah politik keteraturan, kesejahteraan, dan keadilan untuk semua. Gereja sebagai agen misi Allah dalam dunia karena itu tidak boleh a-politis. Keterlibatan politik gereja adalah untuk menunjukkan keberpihakan Allah kepada korban ketidakadilan dan penindasan. Gereja tidak berpolitik untuk dirinya sendiri melainkan mengupayakan kesejahteraan untuk semua terutama dalam keberpihakan dengan mereka yang miskin dan tertindas.⁴²

Berangkat dari motivasi dan tujuan panggilan melayani dalam pengabdian untuk mensejahterahkan masyarakat sebagai yang mendorong jemaat dalam keterlibatannya di kancah politik menjadi bekal untuk seseorang dapat terlibat dalam dunia politik, maka gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya memandang politik sebagai arena mensejahterahkan masyarakat dan jemaat. Pandangan ini sesuai dengan tujuan politik yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Eliazar Daila Baba dalam tulisannya yang berjudul *The Church and Politics* mengatakan bahwa orang kristen melakukannya dengan melatih diri kita untuk melayani orang lain. Umat Kristiani tidak hanya menjadi aktif di mana kepentingan-kepentingan keagamaan dilayani, tetapi memikirkan kesejahteraan bersama semua orang.⁴³ Hal yang sama juga disampaikan oleh Mery Kolimon bahwa gereja tidak berpolitik untuk dirinya sendiri melainkan mengupayakan kesejahteraan untuk semua terutama dalam keberpihakan dengan mereka yang miskin dan tertindas.⁴⁴ Mengupayakan kesejahteraan umum merupakan faktor dan motivasi jemaat terlibat dalam kontestasi Pilkada. Karena itu, penulis sangat setuju dengan pandangan ini.

Hal lain yang mengemuka dalam penelitian ini bahwa politik merupakan proses mendapatkan kekuasaan dalam memerintah untuk kepentingan umum. Pandangan ini sesuai dengan pemahaman Gunche Lugo dalam teori politik modern bahwa politik diasumsikan sebagai kekuasaan negara, yang diwakili oleh partai politik untuk mewakili aspirasi masyarakat, khususnya dalam konteks negara demokrasi. *Politeia* berarti politik dalam arti merebut kekuasaan atau kedudukan dalam pemerintahan.⁴⁵ Maksudnya adalah dengan kekuasaan yang didapat, akan berkontribusi bagi kepentingan umum.

Selain itu, dalam pandangan para responden, mereka juga memahami politik sebagai cara semua lembaga mencapai tujuan. Pandangan ini merupakan salah satu yang disampaikan oleh Majelis Jemaat yang sesuai dengan teori politik dalam buku “Mengetahui Teori-teori Politik” karangan Toni Adrianus Pito, Efrizal, dan Kemal Fasyah bahwa politik dalam hubungannya dengan sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan masyarakat dan suatu lembaga.⁴⁶

Sungguh dalam pemahaman gereja bahwa politik juga merupakan medan pelayanan gereja dan panggilan pelayanan untuk kesejahteraan umat dengan memberitakan serta mewujudkan kebenaran dan keadilan. Artinya bahwa Pilkada dilihat sebagai tempat untuk mereka yang terlibat didalamnya dapat melaksanakan tanggung jawab untuk mensejahterahkan umat dengan mewujudkan nilai-nilai kristiani. Karena itu penulis setuju dengan apa yang di

⁴² Mery Kolimon, “Jabatan Gereja dan Politik Praktis,” *Satutimor.com*, posted on 9 januari 2014

⁴³ Eliazar Daila Baba, Phd, “The Church and Politics,” *International Journal of Humanities Sciences and Education (IJHSSE)* volume 9, Issue 4, April, PP 162-168

⁴⁴ Mery Kolimon, “Jabatan Gereja dan Politik Praktis,” *Satutimor.com*, posted on 9 januari 2014

⁴⁵ Gunche Lugo, *Manifesto Politik Yesus* (Yogyakarta: Yayasan ANDI, 2009), 41-42.

⁴⁶ Toni Adrianus Pito, dkk, *Mengetahui Teori-teori Politik* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2019), 34.

sampaikan oleh A. A Yewangoe bahwa gereja-gereja di Indonesia melihat bidang politik sebagai yang tidak boleh diabaikan. Gereja harus terlibat dalam pelayanan tersebut, sebab pelayanan Yesus mencakup segala sesuatu, demikian keyakinan gereja.⁴⁷ Hal yang sama juga disampaikan oleh Clarke E. Cochran bahwa politik adalah arena yang di dalamnya kepentingan-kepentingan individu atau kelompok (individual or group interests) masuk dalam beberapa cara untuk ditangani melalui proses tertentu dan menjadi hasil (outcomes), kebijakan (policies), atau keluaran (outputs).⁴⁸

Dalam konteks sebagai gereja, politik juga dipahami sebagai seni kerja sama yang menekankan nilai-nilai kristiani serta upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunche Lugo yang mengutip Oscar Cullman bahwa politeuma adalah politik yang menekankan tepatnya nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini misalnya: keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan mewujudkan peradaban baru yang mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26-28).⁴⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Eliazar Daila Baba dalam tulisannya yang berjudul “The Church and Politics” bahwa terlibat aktif dalam politik dipandang sebagai bagian dari keterlibatan kita dalam aksi sosial, keterlibatan orang kristen dalam politik harus di anggap sebagai bagian dari misi gereja karena memberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan injil.⁵⁰

GMIT melihat momentum politik lokal dalam Pilkadaes ini sebagai bidang pelayanan yang mesti dilakukan kepada setiap warganya yang ikut dalam kontestasi tersebut melalui program-program yang terencana dan berkelanjutan. Itu nampak dalam Pokok-pokok Eklesiologi GMIT yang banyak memberi perhatian di bidang politik:

“GMIT dipanggil oleh Tuhan untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia, dan untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Ini menjadi dasar utama bagi keterlibatan GMIT dalam politik. Keterlibatan GMIT dalam politik bukanlah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri melainkan untuk kepentingan umum seluas-luasnya, termasuk kepentingan mereka yang miskin dan tertindas, generasi mendatang dan kepentingan alam semesta, yang tidak dapat bersuara bagi dirinya sendiri dalam forum-forum pengambilan keputusan. Dalam pelayanan sebagai lembaga, GMIT juga melakukan pendampingan pastoral bagi para pelaku politik dan pendidikan politik bagi anggotanya. Dalam konteks ini GMIT menghindari penggunaan simbol-simbol gerejawi untuk kepentingan politik. Peran politik GMIT adalah memberitakan dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, GMIT tidak boleh berpihak, atau menjadi alat dari kekuatan-kekuatan politik tertentu”.⁵¹

Karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa GMIT memahami politik dalam konteks Pilkadaes sebagai proses dan tempat kerjasama mewujudkan kesaksian gereja melalui panggilan

⁴⁷ A. A Yewangoe, *Visi Kristen Mengenai Politik* (Waingapu: Sinode GKS, 2013), 3.

⁴⁸ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme dan Politik Identitas dalam Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Radja Grafindo Persada, 2019), 152.

⁴⁹ Gunche Lugo, *Manifesto Politik Yesus* (Yogyakarta: Yayasan ANDI, 2009), 41-42.

⁵⁰ Eliazar Daila Baba, “The Church and Politics,” *International Journal of Humanities Sciences and Education (IJHSSE)* volume 9, Issue 4, April, PP 162-168

⁵¹ Sinode GMIT, *Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Timor 2010 (Perubahan Pertama)* (Majelis Sinode GMIT, 2015), 38-39.

kristiani untuk menata kehidupan bersama demi kesejahteraan masyarakat dan jemaat guna terwujudnya keadilan, kebenaran, kedamaian, dan perdamaian.

2. Politik sebagai ruang melayani dan aktualisasi diri

Motivasi dan tujuan sebagai warga jemaat dalam ruang politik di masa yang masih produktif sebagai alasan bagi mereka untuk terlibat dalam kontestasi Pilkadaes di pandang sebagai salah satu faktor pendukung. Bahwa mereka masih produktif untuk melayani dan memberikan pelayanan terbaik sehingga berdampak pada sebuah perubahan. Karena itu pelayanan merupakan prioritas untuk terjadinya suatu perubahan. Pandangan ini sama dikemukakan oleh Zakaria Ngelow bahwa politik untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan umum demi kebaikan semua orang dan seluruh ciptaan.⁵²

Selain itu juga ada keprihatinan terhadap kenyataan pemerintah desa yang tidak berpihak pada kepentingan umum dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kristiani. Keprihatinan ini menjadi ruang aktualisasi diri sebagai wujud yang mengakibatkan motivasi untuk dapat merubah pemerintahan yang tidak berpihak pada kepentingan umum. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Marten Luther bahwa setiap penguasa yang memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah dapat ditentang dengan alasan, bahwa dia dengan demikian telah merebut otoritas yang hanya milik Tuhan.⁵³ Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ryan LaMote melihat kenyataan itu maka penting untuk mengadili klaim dan mendisiplinkan serta memperbaiki pelanggaran tatanan sosial dan hukum yang mengatur pengaturan sosial dan distribusi sumber daya.⁵⁴

Dalam cara pandang yang sama, ruang melayani yang ada juga lahir dari semangat memuliakan Tuhan. Sebagai orang Kristen, siapa pun yang terlibat dalam politik harus melakukannya sebagai bentuk ia memuliakan Tuhan. Saya juga setuju dengan pemikiran Eliazar Daila Baba bahwa siapa pun yang terjun ke politik hari ini sebagai seorang Kristen, tujuan dan motifnya haruslah untuk memuliakan Tuhan dan bukan diri sendiri. Ia menyimpulkan bahwa implikasi dari hal ini adalah kesetiaan mereka harus kepada Tuhan dan bukan kepada partai mereka. Yesus harus benar-benar menjadi Tuhan atas hidup mereka termasuk kehidupan rahasia mereka yang tidak diketahui siapa pun kecuali Tuhan.⁵⁵

3. Politik adalah harapan untuk menciptakan suasana yang aman dan damai

Politik memuat sejumlah harapan dari gereja terhadap mereka yang ikut dalam kontestasi politik dalam lingkup desa. Ada pun harapan bagi mereka yang terlibat dalam kancah perpolitikan ketika terpilih menjadi pemimpin dalam lingkup desa adalah untuk melaksanakan tanggung jawab menciptakan suasana yang aman dan damai. Ini searah dengan yang disampaikan oleh John Calvin bahwa pemerintahan sekuler dilembagakan secara ilahi, dan para penguasa memiliki tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada mereka yang mereka layani, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang sangat penting, menegakan standar kesalehan dalam masyarakat, memerangi penyebaran ajaran sesat, memelihara hukum dan ketertiban, membebaskan orang miskin, membebaskan yang tertindas, menyediakan

⁵²Zakaria J. Ngelow. "Turut Membina Indonesia sebagai Rumah Bersama – Peran Gereja dalam Politik di Indonesia." *Jurnal Jafray*, Vol.12, No.2, (2014).

⁵³ Wiley Blackwell, *Companion to Political Theology*, This second edition first published: 2019

⁵⁴ Ryan LaMothé, "A Modest Proposal: A Pastoral Political Theology," *Published online*: 27 Agustus 2013

⁵⁵ Eliazar Daila Baba, "The Church and Politics," *International Journal of Humanities Sciences and Education (IJHSSE)* volume 9, Issue 4, April, PP 162-168

perdamaian bersama, dan menegakan keadilan. Oleh karena itu, panggilan untuk kegiatan politik atau pelayanan pemerintahan bukanlah panggilan yang lebih rendah bagi orang Kristen.⁵⁶

Selain itu juga, para pemimpin dapat merangkul dan memulihkan relasi yang tidak harmonis antara yang mendukung dan yang tidak mendukung sebagai akibat dari Pilkades serta dapat meminimalisir dampak negatif dari Pilkades yaitu jemaat menjadi terkotak-kotak. Gereja mesti memberi pencerahan dan pendidikan “kepemimpinan sahabat” kepada mereka yang terpilih. Penting ini diterapkan dalam menjalankan kuasa pemerintahannya. Sebagaimana dalam Yohanes 13:34 dan 15:13, 15, Yesus menyapa murid-murid-Nya sebagai sahabat dan saling mengasihi. Model kepemimpinan sahabat ini yang oleh Samuel Benyamin Hakh, saat penyampaian materinya dalam Persidangan Majelis Klasik Kota Kupang Timur tahun 2023 mengatakan bahwa:

“Kalau bertolak dari Yohanes 15:13 dan 13:34, maka orang bisa menafsirkan sapaan itu sebagai kasih dan persahabatan yang hanya terbatas pada kelompok sendiri, padahal kasih dan persahabatan yang Yesus berlakukan selama pelayanan-Nya bukan kasih dan persahabatan yang terbatas pada anggota kelompok sendiri. Benar, bahwa dalam Yohanes 15:13 Yesus menyapa murid-murid-Nya sebagai sahabat dan menasihati mereka agar mereka saling mengasihi. Yesus menasihati agar mereka memperkuat persahabatan dan ikatan kasih di antara mereka sehingga mereka tidak tercerai berai dengan adanya tekanan dan ancaman. Kepemimpinan sahabat yang Yesus berlakukan tidak hanya mencakup murid-murid-Nya saja melainkan Ia juga memberlakukan model kepemimpinan ini bagi semua orang dari berbagai latar berlatang profesi, status sosial dan etnis selama pelayanan-Nya”.⁵⁷

Hal ini cocok dengan teori yang disampaikan oleh Andrew Heywood, bahwa politik sebagai proses yang tujuan akhirnya adalah rekonsiliasi perbedaan dan resolusi konflik.⁵⁸ Jika dimaknai maka sesungguhnya politik bertujuan untuk memulihkan perbedaan menjadi hal yang baik yang dapat mempersatukan. Namun dalam kenyataannya, ini justru berbeda dalam banyak pengalaman momentum politik seperti Pilkades yang meninggalkan sejumlah konflik horizontal di tengah-tengah persekutuan masyarakat mau pun jemaat. Sebagai contoh, jemaat menjadi terkotak-kotak akibat perbedaan pilihan politik dalam Pilkades yang mengakibatkan relasi tidak harmonis.

Harapan yang sama juga bagi mereka yang terpilih menjadi pemimpin dalam desa agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan setia kepada Firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Harapan ini sama seperti yang disampaikan oleh Karl Barth yaitu dengan berusaha bekerja untuk menyelamatkan gereja dari kehilangan identitas ini, bukan dengan melindungi bagiannya dalam hak politik umum untuk kebebasan beragama, tetapi dengan memanggil gereja untuk setia kepada Firman Tuhan. Memahami dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dengan sepuh hati dan dengan sukacita, lebih sesuai dengan iman kepada Tuhan dari pada melancarkan serangan yang menakutkan terhadap musuh mana pun.⁵⁹

⁵⁶ Wiley Blackwell, *Companion to Political Theology*, This second edition first published: 2019, 80.

⁵⁷ Samuel Benyamin Hakh, *Kepemimpinan Sahabat dalam Tantangan Politik Identitas di Indonesia dan NTT*, Materi yang disampaikan dalam Persidangan Majelis Klasik Kota Kupang Timur, pada tanggal 23 Januari 2023

⁵⁸ Umar Suryadi Bakry. *Multikulturalisme dan Politik Identitas dalam Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Radja Grafindo Persada, 2019), 153.

⁵⁹ Wiley Blackwell, *Companion to Political Theology*, This second edition first published: 2019

Sejalan dengan itu, termuat harapan yang sama bahwa kepala desa terpilih dapat melayani dengan adil. Pandangan ini senada dengan yang disampaikan oleh Marten Luther bahwa dia juga menawarkan nasihat yang konstruktif tentang bagaimana mereka dapat memerintah dengan lebih efektif dan adil (sambil mengakui bahwa mereka mungkin tidak mengambilnya), mereka harus selalu memiliki kepentingan bersama dan bukan kepentingan mereka sendiri, harus selalu mencari hikmat dari Tuhan.⁶⁰

4. Pelaku politik sebagai garam dan terang yang berdampak bagi dunia

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan pandangan bahwa sebagai orang Kristen yang terlibat dalam kancah politik, mereka melihat politik bukanlah hal yang tabu dan berdosa, tetapi dalam posisi mereka adalah sebagai garam dan terang yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Pandangan ini sama seperti pandangan yang dibangun oleh Eliazar Daila Baba bahwa orang kristen seharusnya menjadi garam dan terang dunia yang dapat bermanfaat bagi masyarakat (Mat. 5:13-16). Dia menekankan bahwa kita tidak bisa menjadi garam dan terang bagi generasi yang rusak dan jahat tanpa kita terlibat dalam politik saat ini. Saat kita terjun ke politik, saat itulah kita dapat menunjukkan keadilan Tuhan, belas kasihan, cinta, kejujuran, dan akuntabilitasnya ke dalam politik dan mencontohkan karakter Tuhan di bidang ini. Sekarang diterima secara umum bahwa salah satu cara utama orang Kristen dapat mempengaruhi masyarakat secara positif dan membuat perbedaan adalah dengan terlibat dalam politik, bisnis dan aksi sosial. Dengan demikian, umat Kristiani akan benar-benar menjadi terang dan garam masyarakat.⁶¹

Menjadi garam dan terang menuntut pelaku politik untuk menjadi panutan dan teladan sebagaimana Yesus Kristus menjadi panutan dan teladan bagi mereka dalam menjalani tanggung jawab yang diberikan. Pandangan ini sama seperti yang disampaikan oleh Bonhoeffer mengenai “kekuatan teladan” yang berasal dari kemanusiaan Yesus. Baginya ini adalah politik yang menuntut gereja menjadi gereja agar dunia menjadi dunia.⁶²

Selain itu juga, pelaku politik dapat menjalani semua ini dengan takut akan Tuhan, hidup kudus dan mencerminkan nilai-nilai kristiani. Pandangan ini juga berkaitan erat dengan apa yang disampaikan oleh Bonhoeffer bahwa politik gereja adalah politik pengudusan. Artinya bahwa pengudusan hanya mungkin dalam komunitas gereja yang terlihat. Pengudusan itu dicapai dalam kematian Kristus dan dimateraiakan melalui Roh Kudus.⁶³ Penulis setuju dengan pandangan ini, bahwa sebagai orang Kristen dalam kancah politik pun mesti menjalaninya dengan hidup kudus, takut akan Tuhan dan selalu mencerminkan nilai-nilai kristiani.

Pendampingan pastoral sebagai bentuk pendampingan bagi warga jemaat yang terlibat dalam kancah politik khususnya yang ikut dalam kontestasi Pilkadaes

Pendampingan pastoral berangkat dari apa yang menjadi kebutuhan konsele. Berdasarkan hasil wawancara semua pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini, ternyata mereka yang adalah warga yang mengikuti kontestasi Pilkadaes sangat membutuhkan pendampingan pastoral dari gereja. Tujuannya adalah agar gereja dapat menolong warga gereja yang sementara

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Eliazar Daila Baba, “The Church and Politics,” *International Journal of Humanities Sciences and Education (IJHSSE)* volume 9, Issue 4, April, PP 162-168

⁶² Wiley Blackwell, *Companion to Political Theology*, This second edition first published: 2019

⁶³ Ibid.

bergumul agar mereka dapat menemukan solusi untuk setiap pergumulan yang dihadapi. Karena itu, gereja mesti memahami pergumulan dan kebutuhan warganya yang ikut dalam kontestasi ini.

Pendampingan pastoral atau "Pastoral Care" merupakan salah satu model pelayanan gereja yang semakin urgen seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksi sosial satu dengan yang lain. Kata pendampingan pastoral adalah gabungan dua kata yang mempunyai makna pelayanan, yaitu pendampingan dan pastoral. Ada interaksi yang sejajar atau timbal balik antara orang yang mendampingi dan yang didampingi. Dengan demikian istilah pendampingan memiliki arti kegiatan kemitraan, bahu-membahu menemani, membagi/berbagi dengan tujuan saling menumbuhkan dan membutuhkan.⁶⁴

Pelayanan pastoral GMIT adalah keseluruhan tindakan pertolongan atas nama gereja milik Tuhan. Keseluruhan tindakan pertolongan atas nama gereja itu meliputi pendampingan, bimbingan, perdamaian, penyembuhan, pengasuhan hidup, pemberdayaan, pembebasan, dan pembaruan/transformasi.⁶⁵ Secara operasional, pelayanan pastoral dilakukan dengan pendekatan pendampingan keseluruhan hidup dan konseling ketika ada masalah. Pelayanan pastoral merupakan bagian dari perwujudan keselamatan Allah bagi manusia.

Dalam Pokok-Pokok Eklesiologi (PPE) GMIT, visi GMIT dihubungkan dengan visi Kerajaan Allah. GMIT terpanggil menghidupi nilai-nilai pemerintahan Allah, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.⁶⁶ Misi GMIT sendiri merupakan wujud keterlibatan dalam karya Allah Tritunggal yang menciptakan, menyelamatkan, dan membarui segenap ciptaan, melalui persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan. Pelayanan pastoral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan misi GMIT tersebut. Pelayanan pastoral bukan sebuah bidang yang terpisah dari panca pelayanan atau berdiri sendiri, melainkan menjiwai seluruh bidang pelayanan. Ada perspektif pastoral dalam seluruh bidang pelayanan. Rencana Induk Pelayanan (RIP) dan Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan (HKUP) GMIT menjadikan koinonia sebagai pintu masuk bagi pastoral dan terintegrasi secara utuh dengan semua bidang panca pelayanan yang lain. Pelayanan pastoral berfokus pada manusia dalam komunitasnya. Visi misi ini bisa direalisasikan dengan konsep inkarnasi. Dengan konsep ini pelayan pastoral hadir penuh, utuh, dan memahami konsep serta konteks berpikir serta permasalahan yang dialami oleh jemaat, baik secara perseorangan, maupun kelompok.

Dari pemaparan hasil penelitian terkait dengan bentuk pendampingan yang telah dilakukan oleh GMIT bagi jemaatnya yang ikut dalam kontestasi Pilkades di Kecamatan Semau dan Semau Selatan, dapat diambil kesimpulan bahwa GMIT masih sekedar memakai pendekatan mendoakan dan melakukan diskusi secara insidental hanya ketika momentum Pilkades dan tidak terencana. Sedangkan di lingkup Klasis memang sudah terprogram tapi masih sebatas melakukan pastoral politik dan mendoakan para calon kepala desa dengan pergumulan yang ada sebelum pemilihan kepala desa, belum terencana untuk pendampingan pastoral secara berkesinambungan dan berkelanjutan pasca Pilkades. Karena itu, jemaat yang ikut dalam kontestasi Pilkades merasa belum puas dengan apa yang harusnya dilakukan oleh gereja dalam hal ini Majelis Jemaat dan Majelis Klasis.

Dalam konteks penelitian ini, penting bagi gereja untuk melakukan pendampingan pastoral sebagai bentuk baru pelayanan gereja dengan tujuan di samping dapat memberi solusi

⁶⁴Aart Van Beek, *Pendampingan Pastoral* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 9.

⁶⁵ Band. Clebsch dan Jaekle (1956) dikutip oleh John Campbel Nelson dalam makalahnya tentang Pedoman Praktis untuk percakapan pastoral pada modul Pelatihan pastoral, halaman 9 tahun 2011. Diterbitkan oleh GMIT.

⁶⁶ Sinode GMIT, *Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Timor 2010 (Perubahan Pertama)* (Majelis Sinode GMIT: 2015), 30.

terhadap pergumulan warganya yang mengikuti kontestasi Pilkades, tetapi juga menolong mereka menemukan hakikat dan jati diri mereka sebagai umat Tuhan yang dipanggil untuk melayani sesama. Seperti yang disampaikan oleh Zakaria J. Ngelow bahwa bingkai teologi peran gereja dalam politik adalah misi gereja untuk kedamaian dan kemakmuran bagi semua ciptaan. Politik kristen bukanlah politik kekuasaan atau untuk kepentingan diri sendiri, tetapi politik untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan umum demi kebaikan semua orang dan seluruh ciptaan.⁶⁷ Dalam kenyataannya, politik lokal seperti Pilkades banyak meninggalkan persoalan dalam persekutuan jemaat. Karena itu, peran gereja melalui pendampingan pastoral dapat memulihkan kondisi psikis dan sosial sebagai akibat dampak Pilkades-pilkades sebelumnya dan mempengaruhi kinerja, kualitas, moralitas dan spiritualitas warganya yang ambil bagian dalam kontestasi itu.

Karena itu, penulis merasa penting untuk gereja melalui perannya dapat dengan baik memahami tujuan dari pendekatan pastoral sebagaimana yang disampaikan oleh Ryan Lamothe dalam tulisannya “A Modest Proposal: A Pastoral Political Theology” yang mengatakan bahwa teologi pastoral politik memiliki empat tujuan, yaitu: Kritis, memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi, menawarkan rencana konkrit, dan menilai implementasi solusi.⁶⁸

- a. Kritis, pemeriksaan sistemik, tata kelola politik, kebijakan, program, dan struktur vis a vis konsep kepedulian dipahami secara teologis. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan ini belum dilakukan secara baik oleh gereja melalui Majelis Jemaat dan Majelis Klasis. Yang telah dilakukan oleh gereja hanyalah sekedar berdoa dan berdiskusi bersama saat hendak tiba pada waktu pemilihan.
- b. Memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi dengan beragam orang lain dalam mengolah ruang publik. Penulis mendapatkan informasi dalam penelitian bahwa pendekatan pastoral yang dilakukan belum secara total memfasilitasi kerja sama dengan beragam orang dalam mengolah ruang publik. Yang dilakukan gereja melalui Majelis Klasis hanya pada kerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memfasilitasi para calon kepala desa, panitia pemilihan, pemerintah desa dan kecamatan serta pihak keamanan dari TNI dan Polri untuk melakukan pastoral politik dan doa bersama pada satu minggu sebelum pemilihan kepala desa serentak, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2022. Sedangkan di lingkup jemaat melalui Majelis jemaat belum melakukan hal ini.
- c. Menawarkan rencana konkrit dalam memenuhi kebutuhan orang lain tertentu-warga negara dan bukan warga negara. Hal ini telah dilakukan dalam Pastoral Politik yang dilakukan oleh Majelis Klasis melalui materi-materi yang punya hubungannya dengan politik dan rencana-rencana ke depan ketika terpilih maupun tidak terpilih. Tetapi ini hanya dilakukan sekali saja. Sedangkan di lingkup Majelis Jemaat belum melakukan hal itu.
- d. Menilai implementasi solusi. Ini penting untuk gereja kawal sampai setelah terpilih dan dampingi saat melakukan tanggung jawab sebagai kepala desa. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa gereja hari ini belum melakukan penilaian terhadap penerapan solusi. Yang dilakukan oleh gereja masih sekedar pastoral politik dan doa saat mendekati hari pelaksanaan Pilkades saja, dan belum berkelanjutan pendampingan gereja terhadap jemaatnya ketika mengemban jabatan sebagai kepala desa. Karena itu, pendampingan pastoral secara terencana bagi warganya yang mengikuti kontestasi Pilkades mesti dilakukan saat sebelum pelaksanaan Pilkades, saat pelaksanaan Pilkades, dan pasca Pilkades.

⁶⁷ Zakaria J. Ngelow,” Turut Membina Indonesia sebagai Rumah Bersama – Peran Gereja dalam Politik di Indonesia,” *Jurnal Jafray*, Vol.12, No.2, 2014

⁶⁸ Ryan LaMothe, “A Modest Proposal: A Pastoral Political Theology,” *Published online*: 27 Agustus 2013

Dari unsur-unsur yang ada dalam tujuan teologi pastoral politik, penulis melihat bahwa Majelis Jemaat dan Majelis Klasik belum memakainya secara baik, bahkan ada yang belum menerapkannya dalam pelayanan gereja khususnya di lingkup Jemaat sebagai basis. Pendampingan pastoral politik secara teologis dimengerti sebagai hubungan politik tentang realitas suatu masyarakat dalam tata kelola, sebuah wacana, kebijakan dan program serta konsekuensi sosial. Analisis dan kritik ini mencakup mendengarkan dan memperhatikan masing-masing unsur yang terlibat, terutama mereka yang rentan dan membutuhkan. Itulah tujuan pendampingan politik. Dengan kata lain, ketika kita mendampingi mereka yang terlibat di dalam kancah politik, sebagai gereja melalui pendampingan pastoral dimengerti bahwa secara teologis hubungan politik yang ada itu mencakup kekuasaan dan otoritas suatu masyarakat, wacana, kebijakan serta program dan konsekuensinya sehingga tugas dari orang yang memimpin itu adalah mendengarkan dan memperhatikan masing-masing masyarakat yang dipimpinnya, terutama mereka yang rentan dan membutuhkan. Karena itu, tujuan dari pendampingan pastoral adalah membangkitkan suatu kesadaran akan pentingnya kerja sama dan kolaborasi kapan pun dan di mana pun guna mengelola ruang penampilan publik yang telah dipercayakan kepada mereka.

Ruang berpolitik adalah ruang tampil untuk mereka dapat menolong orang-orang yang dipimpin untuk dapat mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka, supaya mereka mendapat hak-hak mereka sebagai pihak yang layak di hargai sebagai gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*). Ruang politik ini adalah kesempatan yang baik untuk mengangkat martabat manusia sebagai *Imago Dei* dan untuk mewujudkan kerajaan Allah. Secara teologis, ruang politik bagi mereka yang ikut dalam kontestasi politik adalah ruang penampilan publik. Orang yang diberikan ruang itu mengolah ruang publik itu supaya orang yang dipimpinnya dapat mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka secara baik. Karena itu penting dalam konteks Pilkades, sebelumnya perlu persiapan warga jemaat dengan secara sengaja dan terencana memberikan pencerahan ini kepada mereka. Dalam kenyataannya, ini belum dilakukan secara baik dan terencana di setiap lingkup pelayanan GMIT, apalagi di basis pelayanan yaitu di lingkup jemaat yang langsung bersentuhan dengan pengumpulan setiap jemaat.

Berdasarkan teori tadi, yang mesti menjadi isi yang perlu dilakukan oleh gereja terhadap para warga jemaat yang ikut dalam kontestasi Pilkades adalah membangkitkan kesadaran bahwa ketika seseorang punya kuasa maka hendaknya dipakai untuk dapat mengangkat harkat dan martabat, berekspresi dan berkolaborasi serta dapat menilai penerapan solusi itu apakah pendampingan itu sudah benar-benar menjawab kebutuhan. Sebab dalam pendampingan pastoral itu membangkitkan perasaan belas kasih dalam diri para calon pemimpin dalam lingkup desa.

Belas kasih itu adalah pengakuan dan pemahaman penderitaan orang lain, kesediaan untuk bersama dan berbagi sampai tahap tertentu dalam penderitaan orang-orang yang membutuhkan, dan pengembangan kebijakan yang kompeten dan peduli yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian pendampingan pastoral politik adalah tindakan yang mencakup membangkitkan kesadaran akan keadilan. ini penting di mengerti oleh para calon pemimpin dalam desa, agar kehadiran mereka sebagai pemimpin dapat berdampak bagi diangkatnya harkat dan martabat orang-orang yang dipimpinnya serta dapat berlaku adil dalam kepemimpinannya.

Ruang penampilan publik adalah ruang ketika pemimpin mengorganisasikan masyarakat dengan bertindak dan berbicara untuk kepentingan orang lain. Ruang penampilan publik ini sebagai ruang komunikatif mencakup bidang-bidang yang ada dalam masyarakat untuk menciptakan identitas bersama yang bisa hidup dengan harkat dan martabat secara baik.

Banyak hal yang ditemukan dalam penelitian terkait dengan kenyataan dalam pengalaman kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat dan jemaat yang di dalamnya terdapat situasi dimana kehidupan menjadi tidak benar, tidak adil karena orientasi pelayanan pemimpin hanya pada mereka yang memilihnya saja dan pada tim suksesnya saja, orientasi pemanfaatan dana desa yang cukup besar yang justru menimbulkan bahaya koruptif, situasi perpecahan dalam persekutuan serta relasi sesama yang tidak harmonis. Sesungguhnya, pendampingan pastoral dengan memberikan pemahaman kepada para calon pemimpin dalam desa adalah kesempatan yang dimanfaatkan untuk dapat menolong mereka memperbaiki situasi-situasi yang ada ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain ketika gereja melakukan pendampingan pastoral, sesungguhnya gereja memberikan landasan pemahamannya tentang apa yang dilakukan ketika mendapatkan kuasa dalam memimpin masyarakat yang ada. Pendampingan yang diberikan harus mampu membangkitkan tekad, kemauan mempertahankan dan mengembangkan individu, masyarakat dan lingkungan.

Karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa pendampingan pastoral politik artinya memberdayakan para pemimpin untuk melakukan pendampingan pastoral bagi masyarakat yang dipimpin. Artinya bahwa tugas pastoral juga merupakan bagian dari tugas seorang pemimpin untuk membantu menumbuhkan, merawat orang-orang yang dipimpinnya sehingga damai sejahtera juga menjadi bagian dari mereka yang dipimpin, serta keberpihakan kepada mereka yang rentan, kaum marjinal, dan mereka yang sakit yang mesti dipulihkan dan disembuhkan.

Dasar teologis kepedulian itu ada *Imago Dei* (gambar dan rupa Allah) dan Kerajaan Allah. Perintah dari Yesus untuk berbelas kasih dan pengosongan diri (*kenosis*).⁶⁹ Artinya bahwa isi pastoral bagi para calon pemimpin dalam desa ketika terpilih bukan untuk melayani diri sendiri, tapi bersedia untuk mengosongkan diri sama seperti Yesus untuk melayani banyak orang. Selain itu juga, seorang pemimpin dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui tugas dan tanggungjawab sebagai bentuk pengabdian yang tulus dan mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat yang ia pimpin.

Jemaat yang ikut dalam kontestasi Pilkades penting untuk mendapatkan pelayanan pendampingan pastoral dari gereja, berhubung dinamika berpolitik dalam konteks lokal ini bisa berdampak bagi yang bersangkutan tetapi juga bagi persekutuan bersama. Karena itu fungsi pendekatan pastoral penting untuk dilakukan gereja melalui Majelis Jemaat dan Majelis Klasis.

Rancangan Program/program terencana dan isi pendampingan pastoral

Penting bagi Gereja membuat rancangan program pendampingan pastoral politik yang berkelanjutan dan berkesinambungan kepada warganya yang ikut dalam kontestasi politik termasuk Pilkades. Pendampingan Pastoral yang dimaksudkan adalah tahapannya dimulai dari sebelum pelaksanaan Pilkades dengan membuat kurikulum, modul/materi pendidikan politik warga gereja, SOP pelayanan pendampingan pastoral serta pelatihan kepemimpinan bagi warga gereja. Tahapan saat pelaksanaan Pilkades yaitu gereja melalui Majelis Jemaat dan Majelis Klasis melaksanakan pastoral politik sesuai SOP yang ada, ibadah pengutusan dan doa bersama bagi warganya yang ikut dalam kontestasi Pilkades. Tahapan pasca Pilkades: gereja secara terencana melakukan pendampingan bagi warganya sebagai calon yang tidak terpilih beserta pendukungnya untuk menguatkan mereka terhadap hasil yang dicapai, serta kepala desa terpilih dengan pendukungnya untuk mengayomi semua masyarakat, medampinginya dalam melaksanakan kuasa pemerintahan melalui kepemimpinannya dengan cara terencana melakukan pembinaan rohani bagi kepala desa dan aparat desa secara rutin sekali dalam sebulan atau sekali

⁶⁹ Ibid.,

dalam tiga bulan dan melakukan diskusi-diskusi secara terencana bersama kepala desa dan aparatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Politik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru adalah *pertama*, sebagai tindakan untuk menata kembali yang kacau menjadi baik dan teratur, yang rusak menjadi baik. Hal ini nampak dalam kisah penciptaan Allah yang menata dunia yang khaos (kekacauan) menjadi tertib dan teratur, serta upaya Yesus untuk menata kembali tatanan kehidupan dalam masyarakat yang rusak menjadi baik. *Kedua*, politik menunjuk pada keberpihakan atau bela rasa kepada orang yang lemah dan tertindas, memperjuangkan hak-hak orang kecil, dan tindakan pembebasan dan penyelamatan demi kesejahteraan masyarakat dan jemaat. *Ketiga*, Politik adalah tindakan melawan sistem dalam kekuasaan yang menindas.
2. Menyikapi sejumlah dampak dari Pilkades sebagai akibat kurangnya perhatian gereja bagi warganya yang ikut dalam kontestasi Pilkades maka bentuk pendampingan GMIT saat ini bagi warganya yang mengikuti kontestasi Pilkades dengan melakukan pendampingan pastoral politik yang berkelanjutan dan berkesinambungan secara terencana dan terprogram yang dimulai sebelum Pilkades, saat Pilkades, dan pasca Pilkades.
3. GMIT memahami bahwa politik adalah salah satu medan pelayanan gereja untuk memperjuangkan keadilan dan kedamaian berdasarkan nilai-nilai kristiani bagi kesejahteraan manusia dan alam ciptaan. Oleh karena itu GMIT perlu mempersiapkan, memperlengkapi, menolong dan mendampingi warganya untuk berpolitik khususnya dalam konteks lokal dalam momentum Pilkades secara baik dan benar. Hubungan gereja dan Politik khususnya dalam politik lokal dipahami sebagai ruang partisipasi dalam memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan jemaat
4. Peran GMIT bagi warganya yang ikut dalam kontestasi Pilkades masih minim dirasakan. Gereja di lingkup jemaat belum secara terencana membuat program yang matang untuk melihat fenomena masalah politik di tingkat desa. Dalam momentum Pilkades, bentuk pendampingan GMIT di lingkup jemaat masih hanya sekedar mendoakan para calon kepala desa dan tidak ikut mendampingi yang terpilih dalam peran kepemimpinannya. Sedangkan bentuk pendampingan GMIT di lingkup Klasis Semau sudah direncanakan tapi masih terbatas pada pastoral politik dan ibadah pengutusan bagi warganya yang ikut dalam kontestasi Pilkades. Karena itu, maka bentuk pendampingan yang telah dilakukan dirasa masih kurang efektif.
5. GMIT harus melakukan pendampingan pastoral politik yang berkelanjutan dan berkesinambungan kepada warganya yang ikut dalam kontestasi politik termasuk Pilkades. Pendampingan Pastoral yang dimaksudkan adalah tahapannya dimulai dari sebelum pelaksanaan Pilkades dengan membuat kurikulum, modul/materi pendidikan politik warga gereja, SOP pelayanan pendampingan pastoral serta pelatihan kepemimpinan bagi warga gereja; Tahapan saat pelaksanaan Pilkades yaitu gereja melalui Majelis Jemaat dan Majelis Klasis melaksanakan pastoral politik sesuai SOP yang ada, ibadah pengutusan dan doa bersama bagi warganya yang ikut dalam kontestasi Pilkades; Tahapan pasca Pilkades: gereja secara terencana melakukan pendampingan bagi warganya sebagai calon yang tidak terpilih beserta pendukungnya untuk menguatkan mereka terhadap hasil yang dicapai, serta kepala desa terpilih dengan pendukungnya untuk mengayomi semua masyarakat, mendampingi dalam melaksanakan kuasa pemerintahan melalui kepemimpinannya dengan cara terencana

melakukan pembinaan rohani bagi kepala desa dan aparat desa secara rutin sekali dalam sebulan atau sekali dalam tiga bulan dan melakukan diskusi-diskusi secara terencana bersama kepala desa dan aparatnya; Pendampingan pastoral yang dilakukan secara terencana oleh gereja harus secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam tahapan sebelum Pilkades yaitu membuat program pendampingan serta materi/isi dan SOP pendampingan pastoral, memberikan pendidikan politik kepada warganya; saat pelaksanaan Pilkades yaitu memberikan pendidikan politik melalui pastoral politik kepada calon kepala desa dan mendoakan warganya yang ikut dalam kontestasi Pilkades; dan pasca Pilkades yaitu tetap mendampingi dan mendoakan warganya yang terpilih sebagai kepala desa maupun yang tidak terpilih bersama pendukungnya agar mereka kuat menghadapi kenyataan yang ada.

Gereja mesti memainkan tugasnya sebagai gembala untuk mengembalakan jemaatnya ke arah yang baik dan benar, sebagaimana kesaksian dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai Allah sebagai gembala yang baik, menemukan yang terhilang, merawat, melindungi, memberi makan bagi umat sebagai kawanan domba peliharaan Allah. Karena itu maka Yesus mengharapkan komitmen gereja untuk mengembalakan domba-domba Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Alkitab

Alkitab, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia

Buku

Bogman, Robert dan Steven Taylor. *Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020

Ngelow, Zakaria J. dkk. *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru*. Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2014

Van Beek, Aart. *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011

Yewangoe, A. A. *Tidak Ada Penumpang Gelap*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009

Yewangoe, A. A. *Visi Kristen Mengenai Politik*. Waingapu: Sinode GKS, 2013

Jurnal

Blackwell Wiley. "Companion to Political Theology." *This second edition first published*: (2019).

liazar Daila Baba, "The Church and Politics," *International Journal of Humanities Sciences and Education (IJHSSE)* volume 9, Issue 4, April, PP 162-168

LaMothe Ryan, "A Modest Proposal: A Pastoral Political Theology," *Published online*: 27 Agustus 2013

Ngelow, Zakaria J. “Turut Membina Indonesia sebagai Rumah Bersama – Peran Gereja dalam Politik di Indonesia.” *Jurnal Jafray*, Vol.12, No.2, (2014).

Usman, Syaiku. “Politik Lokal di Era Desentralisasi: Menuju Otonomi Rakyat.” *Lembaga Penelitian Smeru*, (2003).

Yani Ahmad, “Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, (2022).

Internet

Kolimon, Mery, *Jabatan Gereja dan Politik Prakts*, Satutimor.com, posted on 9 januari 2014

Foucault, Michel, *Kuasa Pastoral dan Spiritualitas Politik*. Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.com

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, poin 5

Dokumen GMIT

Hakh, Samuel Benyamin, *Kepemimpinan Sahabat dalam Tantangan Politik Identitas di Indonesia dan NTT*, Materi yang disampaikan dalam Persidangan Majelis Klasik Kota Kupang Timur, pada tanggal 23 Januari 2023

Laporan Majelis Klasik Semau Tahun 2022

Rekomendasi Persidangan Sinode GMIT XXXIV/2019 Kepada Majelis Sinode GMIT Periode 2020-2023 untuk menetapkan Perubahan atas Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 28/KEP/SIN-GMIT/XXXI/ 2007 Tentang Presensia dan Representasi Kristen Dalam Politik

Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Timor 2010 (Perubahan Pertama), Majelis Sinode GMIT, 2015

Wawancara

Banik Donny (Pdt), Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

Holbala Yapi, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

Holeng Imanuel, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

Killa Dany, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

Lafu Uniasis, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

Laiskodat Yigal, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

Mestuni Yusuf, wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

Muni Lidya (Pdt), Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

Nenokeba Daud, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

Suna Efron, Wawancara pada tanggal 27 Oktobr 2022

Tameno Yalven (Pdt), Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

Tude Welmince (Pdt), Wawancara pada tanggal 26 Januari 2023